

Pengembangan Kawasan Konservasi Pesisir Berbasis Masyarakat Yang Terimplementasi Dalam RZWP3K Di Kampung-Kampung Kawasan Pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe

Perkumpulan YAPEKA



LAPORAN AKHIR PROGRAM

Juli 2018 – Agustus 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
Daftar Tabel	5
I. Informasi Program	6
II. Ringkasan	7
III. Capaian	10
A. Objektif proyek	10
Indikator 1: Terbentuknya KKP di Nanusa dan Nandedakele, berikut kelompok pengelolanya	10
Indikator 2: Setidaknya masyarakat di kampung sasaran penyadartahuan menyadari dan mengetahui pentingnya dugong dan satwa laut lainnya	17
Indikator 3: Masyarakat mampu melakukan monitoring KKP secara mandiri, kelompok pengelola terintegrasi ke dalam Pokmaswas, dan pengawasan dugong masuk ke dalam tupoksi Pokmaswas	23
Indikator 4: KKP di Sangihe masuk dan terintegrasi ke dalam RZWP3K dan atau turunannya	25
B. Output	26
Output 1: Terbentuknya KKP berbasis masyarakat beserta kelembagaannya di Nanusa dan Nandedakele yang terintegrasi ke dalam kebijakan pemerintah kampung	27
Output 2: Masyarakat sadar akan pentingnya dugong dan satwa laut penting lainnya dan merubah perilaku yang mengancam kelestariannya	28
Output 3: Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan monitoring KKP meningkat, dan kelompok pengelola terintegrasi ke dalam Pokmaswas serta pengawasan dugong terintegrasi dalam tupoksi Pokmaswas melalui monitoring buku nelayan	31
Output 4: Zona KKP berbasis masyarakat di Sangihe masuk/terintegrasi ke dalam RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara dan atau turunannya	38
IV. Perubahan	46
V. Pembelajaran	50
VI. Status Keuangan	53

Daftar Gambar

Figure 1 Berita acara musyawarah pembentukan KKP-BM di Kampung Nanusa, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	11
Figure 2 Berita acara musyawarah pembentukan KKP-BM di Kampung Nandedakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	12
Figure 3 Berita acara musyawarah pembentukan kelompok pengelola KKP-BM di Kampung Nanusa, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	13
Figure 4 Berita acara musyawarah pembentukan kelompok pengelola KKP-BM di Kampung Nandedakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	14
Figure 5 Musyawarah penentuan zonasi KKP-BM Kampung Nanusa.....	15
Figure 6 Musyawarah penentuan zonasi KKP-BM Kampung Nandedakele.....	15
Figure 7 Peta KKP-BM Kampung Nanusa.....	16
Figure 8 Peta KKP-BM Kampung Nandedakele.....	17
Figure 9 Kegiatan penyadartahuan di Kecamatan Nusa Tabukan.....	18
Figure 10 Kegiatan penyadartahuan di Kecamatan Tabukan Selatan.....	19
Figure 11 Kegiatan penyadartahuan di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah.....	19
Figure 12 Kesepakatan Bersama Antar Kampung di Kecamatan Tabukan Selatan mengenai pengelolaan sumber daya alam.....	20
Figure 13 Draft Kesepakatan Bersama Antar Kampung di Kecamatan Nusa Tabukan mengenai pengelolaan sumber daya alam.....	21
Figure 14 Draft Kesepakatan Bersama Antar Kampung di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah mengenai pengelolaan sumber daya alam.....	21
Figure 15 Desain kaos.....	22
Figure 16 Desain poster dugong.....	22
Figure 17 Dokumentasi beberapa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelanggar di Kampung Batuwingkung.....	23
Figure 18 Kapitalaung Bukide Timur menunjukkan jaring hasil sitaan pelanggaran di KKP Bukide Timur. Pelanggaran terjadi bulan Februari 2019.....	24
Figure 19 Hasil pengisian buku nelayan milik salah satu warga Kampung Batuwingkung.....	25
Figure 20 Peta pengusulan pencadangan kawasan konservasi di Sangihe.....	26
Figure 21 Draft Peraturan Kampung mengenai KKP di Nanusa (kiri) dan Nandedakele (kanan).....	27
Figure 22 Serah terima poster dugong kepada Kapitalaung Batuwingkung.....	29
Figure 23 Serah terima poster dugong kepada perangkat Kampung Nusa.....	29
Figure 24 Poster dugong yang terpasang di Kampung Barangka.....	30
Figure 25 Poster dugong yang terpasang di Kampung Batuwingkung.....	30
Figure 26 Penyusunan rencana pengelolaan KKP Bukide Timur.....	32
Figure 27 Penyusunan rencana pengelolaan KKP Bukide.....	33
Figure 28 Penyusunan rencana pengelolaan KKP Batuwingkung.....	34
Figure 29 Koordinasi dengan Pangkalan TNI AL di Tahuna.....	35
Figure 30 Koordinasi dengan POLAIRUD di Tahuna.....	35

Figure 31 Kegiatan Lokakarya Membangun Mekanisme Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe	36
Figure 32 Berita acara kesepakatan mekanisme pengawasan dan pengamanan KKP-BM di Sangihe	36
Figure 33 Contoh format pencatatan buku nelayan	37
Figure 34 Konsultasi dengan DKP Kabupaten Kepulauan Sangihe	39
Figure 35 Diskusi publik yang diselenggarakan oleh DKP Provinsi Sulawesi Utara untuk membahas Perda No. 1 Tahun 2017.....	40
Figure 36 Diskusi tanggal 21 November 2018 dengan Kepala Seksi Konservasi dan Perlindungan Jenis Ikan DKP Provinsi Sulawesi Utara.....	41
Figure 37 Pertemuan dengan salah satu staf Direktorat KKHL, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 November 2018.....	42
Figure 38 Konsultasi dengan para pihak di pemerintah tingkat provinsi pada tanggal 6 Maret 2019	43
Figure 39 Pertemuan dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 16 Juli 2019	44
Figure 40 Diskusi Kelompok Terarah tanggal 23 Juli 2019 di Tahuna.....	44
Figure 41 Berita acara kesepakatan Diskusi Kelompok Terarah tanggal 23 Juli 2019	45
Figure 42 Pertemuan dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 14 Agustus 2019.....	45

Daftar Tabel

Table 1 Perubahan asumsi/resiko dan respon yang dilakukan lembaga	7
Table 2 Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas.....	46
Table 3 Peningkatan pengelolaan terhadap KBA	46
Table 4 Perlindungan kawasan	46
Table 5 Karakteristik penerima manfaat	47
Table 6 Jumlah penerima manfaat.....	47
Table 7 Regulasi/kebijakan lokal	48
Table 8 Jaringan kerja/forum multipihak	49
Table 9 Bentang alam produktif.....	49
Table 10 Pembelajaran yang diambil	50

I. Informasi Program

<u>Wilayah Pendanaan</u>	:	Sangihe Talaud dan Koridor Laut Sulawesi Utara
KBA	:	Perairan Sangihe
Strategic Direction(s)	:	4. Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut
<u>Nama Proyek</u>	:	Pengembangan Kawasan Konservasi Pesisir Berbasis Masyarakat Yang Terimplementasi Dalam RZWP3K Di Kampung-Kampung Kawasan Pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe
<u>Nomor Laporan</u>	:	
<u>Periode waktu</u>	:	Juli 2018 – Agustus 2019 (13 bulan)
<u>Disampaikan oleh</u>	:	Ami Raini Putriraya
<u>Tanggal</u>	:	30 Agustus 2019

Hibah CEPF:

(a) dalam USD: -

(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 450.000.000

Kontribusi Mitra: Rp. 4.159.765

Kontribusi donor (program) lain (jika ada): -

Periode program: Juli 2018 – Agustus 2019

Lembaga pelaksana (mitra): Perkumpulan YAPEKA

II. Ringkasan

Secara umum, kondisi program berjalan sesuai rencana. Sebagian besar dari capaian sudah tercapai dan memenuhi target. Hanya saja beberapa kegiatan yang berhubungan dengan buku nelayan kurang memenuhi target, dikarenakan masih belum tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat dan kurangnya dorongan dari pemerintah kampung.

Namun demikian, beberapa capaian penting yang telah berhasil dicapai antara lain: (1) terbentuknya dua Kawasan Konservasi Pesisir berbasis masyarakat tambahan di Nanusa dan Nandedakele, Kecamatan Nusa Tabukan; (2) pengelolaan KKP di empat kampung sasaran terdahulu sudah cukup baik; (3) masyarakat mulai sadar pentingnya dugong dan satwa laut lainnya untuk konservasi pesisir dan laut; dan (4) KKP di Sangihe sudah masuk ke dalam proses pengusulan pencadangan kawasan konservasi dalam RZWP3K Sulawesi Utara.

Pengusulan inisiasi masyarakat tapak seluas 66,386.62 ha bisa dicapai karena: (1) kerja multi sektor yang sangat baik (sektor KKP, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan); (2) komunikasi kebijakan yang aktif di level kabupaten, provinsi, dan pusat/nasional; (3) strategi *visioning* yang tepat menggabungkan pendekatan sains dan kebijakan dalam *framework* SES (*Social-Ecological System*); (4) secara khusus, komunikasi kebijakan dilakukan di level pusat untuk memastikan keberlanjutan proses dan integrasi capaian proyek dengan target nasional.

Adapun perubahan asumsi/resiko serta respon/tindakan lembaga adalah sebagai berikut:

Table 1 Perubahan asumsi/resiko dan respon yang dilakukan lembaga

Kegiatan	Asumsi	Respon
1.1. Konsultasi penentuan zonasi KKP dan pembentukan kelompok pengelola KKP di Nanusa dan Nandedakele.	Masyarakat Nanusa dan Nandedakele menyetujui adanya KKP dan zonasinya di wilayah mereka, didukung oleh pemerintah kampung dan MTK. Masyarakat Nanusa dan Nandedakele bersedia mengelola KKP di wilayah mereka dan membentuk kelompok dengan dukungan dari pemerintah kampung.	Tidak ada perubahan
1.2. Penyusunan Kesepakatan dan draft Peraturan Kampung mengenai KKP di Nanusa dan Nandedakele.	Pemerintah kampung, MTK, dan masyarakat Nanusa dan Nandedakele mendukung keberadaan KKP dan ikut serta dalam penyusunan kesepakatan dan peraturan kampung.	Tidak ada perubahan
2.1. Sosialisasi pada	Masyarakat dan pemerintah	Tidak ada perubahan

masyarakat sekitar KKP dan kampung lain di pesisir.	kampung di lokasi-lokasi sasaran mendukung dan menghadiri kegiatan sosialisasi.	
2.2. Cetak dan distribusi poster infografis.	Kesadartahuan akan terbangun di tingkat masyarakat.	Tidak ada perubahan
2.3. Cetak dan distribusi kaos.	Kesadartahuan akan terbangun di tingkat masyarakat.	Tidak ada perubahan
2.4. Sosialisasi dan sharing data “buku nelayan”.	Masyarakat nelayan bersedia mendukung dan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan sharing data “buku nelayan”.	Tidak ada perubahan
3.1. Penyusunan rencana pengelolaan KKP di kampung Batuwingkung, Nusa, Bukide, Bukide Timur, Nanusa dan Nanedakele yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa (RPJM Kampung dan RKP Kampung).	Kelompok pengelola KKP dan pemerintah kampung terlibat aktif dalam penyusunan rencana pengelolaan KKP dan integrasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan kampung.	Tidak ada perubahan
3.2. Lokakarya dengan pihak terkait di tingkat kabupaten untuk pengawasan dan pengamanan KKP	Kelompok pengelola KKP, pemerintah kampung, MTK, DKP Kabupaten, Bakamla/Polairud/Babinsa mendukung dan sepakat untuk bekerja sama dalam pengawasan dan pengamanan KKP.	Tidak ada perubahan
3.3. Pelatihan dan pengenalan “buku nelayan” sebagai alat monitoring dampak KKP bagi masyarakat.	Masyarakat nelayan bersedia bekerja sama dalam pencatatan “buku nelayan” secara aktif. Masyarakat memiliki kemampuan baca-tulis yang mencukupi.	Tidak ada perubahan
3.4. Pendampingan pencatatan “buku nelayan” dan pendampingan untuk pengawasan KKP.	Masyarakat nelayan bersedia bekerja sama dalam pencatatan “buku nelayan” secara aktif. Masyarakat memiliki kemampuan baca-tulis yang mencukupi.	Menghimbau untuk dilakukan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Namun hal ini ternyata masih belum membuahkan hasil.

3.5. Analisis data hasil pencatatan “buku nelayan”.	Buku Nelayan diisi dengan baik dan konsisten.	Hanya satu hasil analisis karena hanya satu kampung yang mencatat.
4.1. Rangkaian konsultasi dengan DKP tingkat Kabupaten.	Kelompok pengelola KKP, pemerintah kampung, dan DKP Kabupaten bersedia untuk berdiskusi dalam mengintegrasikan KKP di Sangihe ke dalam RZWP3K dan atau turunannya.	Tidak ada perubahan
4.2. Rangkaian konsultasi dengan DKP dan Bappeda tingkat Provinsi untuk mengintegrasikan KKP berbasis masyarakat di Sangihe ke dalam RZWP3K dan atau turunannya.	DKP Provinsi dan Bappeda bersedia untuk berdiskusi dalam mengintegrasikan KKP di Sangihe ke dalam RZWP3K dan atau turunannya.	Tidak ada perubahan
4.3. Diseminasi proyek di tingkat provinsi.	Kelompok pengelola KKP, pemerintah kampung, DKP Kabupaten, DKP Provinsi, dan Bappeda bersedia untuk berdiskusi dalam mengintegrasikan KKP di Sangihe ke dalam RZWP3K dan atau turunannya.	Tidak ada perubahan

III. Capaian

A. Objektif proyek

Objektif atau tujuan dari proyek ini adalah “pengembangan dan perluasan KKP berbasis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mengintegrasikannya ke dalam RZWP3K dan atau turunannya.”

Objektif ini telah dicapai dengan terpenuhinya indikator-indikator sebagai berikut:

- Terbentuknya KKP di Nanusa dan Nandedakele, berikut kelompok pengelolanya.
- Setidaknya masyarakat di kampung sasaran penyadartahuan menyadari dan mengetahui pentingnya dugong dan satwa laut lainnya.
- Masyarakat mampu melakukan monitoring KKP secara mandiri, kelompok pengelola terintegrasi ke dalam Pokmaswas, dan pengawasan dugong masuk ke dalam tupoksi Pokmaswas.
- KKP di Sangihe masuk dan terintegrasi ke dalam RZWP3K dan atau turunannya.

Indikator 1: Terbentuknya KKP di Nanusa dan Nandedakele, berikut kelompok pengelolanya

Persiapan pembentukan KKP berbasis masyarakat (KKP-BM) di Nanusa dan Nandedakele sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum proyek dimulai, yaitu di tahun 2017 ketika pembentukan KKP-BM di Nusa, Bukide, dan Bukide Timur berproses. Dengan kata lain, KKP di Nanusa dan Nandedakele adalah outcome tambahan dari proyek CEPF pendahulunya di Sangihe. Persiapan pembentukan ini antara lain koordinasi, sosialisasi, dan konsultasi dengan perwakilan pemerintah desa/kampung dan masyarakat di Nanusa dan Nandedakele. Selain itu, kedua kampung ini juga telah menandatangani kesepakatan bersama antar kampung dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kecamatan Nusa Tabukan.

KKP-BM di Nanusa dan Nandedakele terbentuk pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan ditandatanganinya berita acara pembentukan KKP yang ditandatanganinya oleh Kapitalaung (kepala kampung), MTK (Majelis Tua-tua Kampung)/BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan seorang wakil dari masyarakat.

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR

Pada hari ini Kamis, 11 Oktober 2018 bertempat di Balai Kampung Nanusa telah dilakukan musyawarah kampung, yang dipimpin oleh Kapitalaung Kampung ibu Djum Armina Manolang. Musyawarah dihadiri oleh unsur pemerintah kampung, MTK, LPM dan masyarakat, membahas tentang:

1. Wilayah Kampung Nanusa yang akan menjadi lokasi Kawasan Konservasi Pesisir (KKP).
2. Pembahasan kesepakatan-kesepakatan terkait Kawasan Konservasi Pesisir (KKP).
3. Pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok pengelola KKP di Kampung Nanusa.

Setelah melalui diskusi dan masukan peserta, menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Kawasan Konservasi Pesisir di Kampung Nanusa terbagi menjadi 2 zona, yaitu zona pemanfaatan dan zona inti. Zona pemanfaatan terletak sepanjang Tanjung Beha (Lindongan I) sampai di Tanjung Bengele (Lindongan II). Zona inti terletak di seputaran Tanjung Mangka, perbatasan antara Bebitung dan Tawara.
2. Poin-poin kesepakatan-kesepakatan terkait KKP Kampung Nanusa sebagaimana terlampir.
3. Menetapkan nama kelompok, pengurus dan anggota kelompok sebagaimana terlampir.

Berita Acara Musyawarah ini dibuat dan dipergunakan menurut perlunya.

Pimpinan Rapat

Djum Armina Manolang

MTK



Valentine Samula

LPM



J. F. Manorek

MASYARAKAT



Abdahu Kiraling

Figure 1 Berita acara musyawarah pembentukan KKP-BM di Kampung Nanusa, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR

Pada hari ini Kamis, 15 Oktober 2018 bertempat di Balai Kampung Nandedakele telah dilakukan musyawarah kampung, yang dipimpin oleh Kapitalaung Kampung Nandedakele, Bapak Husen Mahengkang. Musyawarah dihadiri oleh unsur pemerintah kampung, MTK, LPM dan masyarakat, membahas tentang:

1. Wilayah Kampung Nandedakele yang akan menjadi lokasi Kawasan Konservasi Pesisir (KKP).
2. Pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok pengelola KKP di Kampung Nandedakele.

Setelah melalui diskusi dan masukan peserta, menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Kawasan Konservasi Pesisir di Kampung Nandedakele terbagi menjadi 2 zona, yaitu zona pemanfaatan dan zona inti. Zona pemanfaatan terletak sepanjang Tanjung Beha (Lindungan III) sampai di Tanjung Beba (Lindungan I). Zona inti terletak di wilayah perairan depan Lindongan II (Lue).
2. Menetapkan nama kelompok, pengurus dan anggota kelompok sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat dan dipergunakan menurut perlunya.



MTK

Krestefanus Lalo

LPM

Idhan Kondoalumang

MASYARAKAT

Izhail Onthoni

Figure 2 Berita acara musyawarah pembentukan KKP-BM di Kampung Nandedakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pembentukan KKP-BM di Kampung Nanusa dan Nandedakele ini juga disertai dengan pembentukan kelompok pengelola KKP. Berita acara pembentukan kelompok ini disepakati dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kapitalaung (kepala kampung), MTK/BPD, LPM dan seorang wakil dari masyarakat.

**PENGURUS KELOMPOK
PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PESISIR
KAMPUNG NANUSA
KAKINDOA**

PERIDOE 2018-2023

Pembina dan penanggung jawab : Kapitalaung Nanusa
Ketua : Abdahu Kiraling
Sekretaris : Onevorus Kahembau
Bendahara : Arniati Daling
Bidang Keamanan :
Koordinator : Aldi Makaluas
Anggota : Abubakar Mandiri
Anggota : Ansmad Mamondol
Bidang Monitoing dan pengawasan :
Koordinator : Johan F. Manorek
Anggota : Mekri Goha
Anggota : Yosias Salawati
Bidang Pendidikan dan Pelatihan :
Koordinator : Mulgis Kiraling
Anggota : Mulyono Makagiantang
Anggota : Melki Lalenh
Bidang Perlengkapan :
Koordinator : Yusrian Kiraling
Anggota : Novembri Kahembau
Anggota : Sulce Musaling

Ditetapkan di : Kampung Nanusa
Pada Tanggal : 11 Oktober 2018



Figure 3 Berita acara musyawarah pembentukan kelompok pengelola KKP-BM di Kampung Nanusa, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe

**PENGURUS KELOMPOK
PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PESISIR
KAMPUNG NANEDAKELE
LUTISAPA**

PERIDOE 2018-2023

Pembina dan penanggung jawab : Kapitalaung Nandedakele
Ketua : Jurumudi Kondoalumang
Sekretaris : Sri Meyatri Onthoni
Bendahara : Yeni Antara
Bidang Keamanan :
Koordinator : Idhan Kondoalumang
Anggota : Jefri Dalige
Anggota : Suritno Kondoalumang
Bidang Monitoring dan pengawasan :
Koordinator : Izhail Onthoni
Anggota : Julhilman Yonas
Anggota : Arman Lintuhaseng
Bidang Pendidikan dan Pelatihan :
Koordinator : Kretefanus Lalo
Anggota : Irwandi Onthoni
Anggota : Muhamad Ali Stirman
Bidang Perlengkapan :
Koordinator : Rezaldo Onthoni
Anggota : Zulaikha Janis
Anggota : Sitti Kahembau

Ditetapkan di : Kampung Nandedakele
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018



Figure 4 Berita acara musyawarah pembentukan kelompok pengelola KKP-BM di Kampung Nandedakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe

Konsultasi masyarakat dilakukan pada kuartal I proyek di masing-masing kampung. Konsultasi ini bertujuan untuk menentukan zonasi-zonasi atau area-area dengan peruntukan khusus yang ada di dalam wilayah KKP-BM. Konsultasi ini dihadiri oleh Kapitalaung, perangkat kampung dan wakil-wakil masyarakat.



Figure 5 Musyawarah penentuan zonasi KKP-BM Kampung Nanusa



Figure 6 Musyawarah penentuan zonasi KKP-BM Kampung Nandedakele

Kampung Nanusa telah menyepakati pembentukan KKP-BM seluas 60.95 ha, yang terdiri dari 5 ha untuk zona inti dan 55.93 untuk zona pemanfaatan. Sedangkan Kampung Nandedakele menyepakati untuk membentuk KKP-BM seluas 89.09, yang terdiri dari zona inti 8.03 ha, zona perikanan terbatas 19.19 ha, dan zona perikanan berkelanjutan 61.87 ha.



Figure 7 Peta KKP-BM Kampung Nanusa

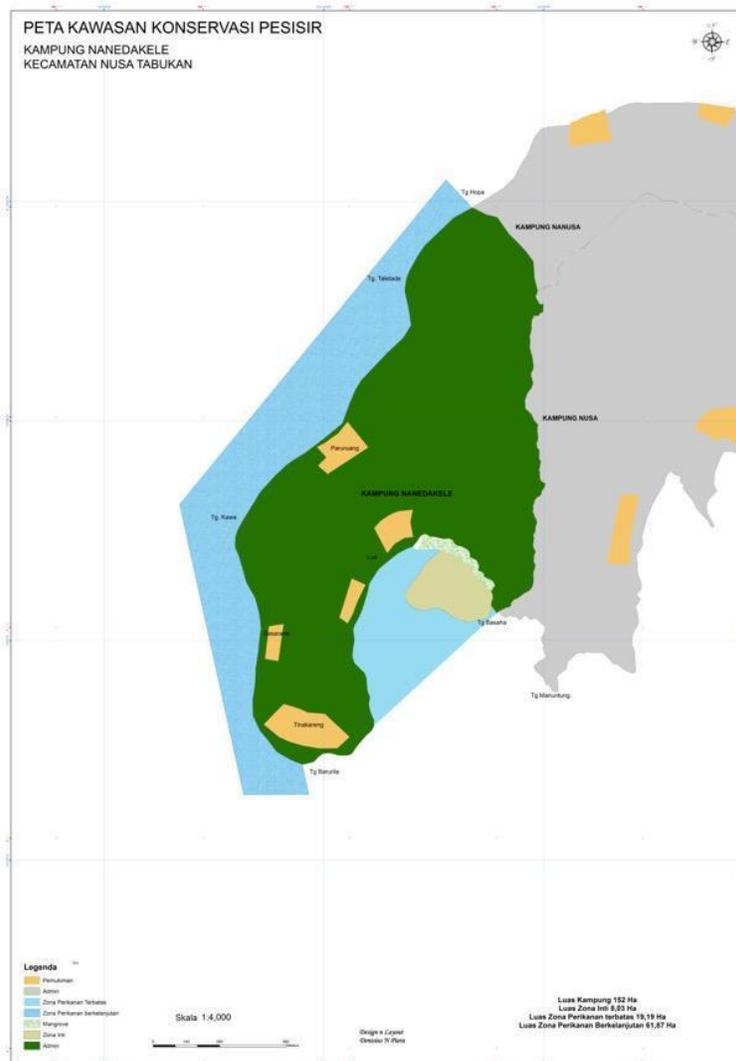


Figure 8 Peta KKP-BM Kampung Nandedakele

Indikator 2: Setidaknya masyarakat di kampung sasaran penyadartahuan menyadari dan mengetahui pentingnya dugong dan satwa laut lainnya

Kegiatan penyadartahuan dilakukan di kuartal II dan III, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kampung. Kegiatan di tingkat kecamatan dilakukan untuk memperoleh peserta dengan cakupan yang lebih luas dan sekaligus diketahui oleh pemerintah di tingkat kecamatan. Peserta yang diundang adalah perwakilan dari pemerintah kampung-kampung yang ada di dalam wilayah ketiga kecamatan tersebut. Kegiatan penyadartahuan di tingkat kecamatan dilakukan dalam bentuk Workshop Membangun Kesepakatan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kecamatan Nusa Tabukan, Tabukan Selatan, dan Tabukan Selatan Tengah. Sedangkan di tingkat kampung, penyadartahuan dilakukan di Kampung

Laotongan, Palareng, Beeng Darat, dan Bulu. Kegiatan ini mengundang perangkat kampung, MTK, dan wakil masyarakat dan nelayan.



Figure 9 Kegiatan penyadartahuan di Kecamatan Nusa Tabukan



Figure 10 Kegiatan penyadartahuan di Kecamatan Tabukan Selatan



Figure 11 Kegiatan penyadartahuan di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah

Dalam kegiatan-kegiatan penyadartahuan ini juga ditandatangani kesepakatan bersama antar kampung untuk pengelolaan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Kesepakatan bersama yang telah ditandatangani adalah di Kecamatan Tabukan Selatan. Untuk Kecamatan Nusa Tabukan, draft kesepakatan belum ditandatangani karena masih belum ada kesepakatan batas wilayah antara Nanusa dan Nandedakele. Selain itu, Kapitalaung Nanusa meninggal dunia, sehingga penandatanganan masih tertunda. Kesepakatan di Nusa Tabukan rencananya akan ditandatangani pada tanggal 13 September 2019 di acara pembahasan batas wilayah yang difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Sangihe. Sedangkan kesepakatan di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah belum ditandatangani karena beberapa kampung mengusulkan penambahan poin kesepakatan, yaitu Peraturan Kampung tentang pengelolaan pesisir mandiri yang telah dilakukan oleh Beeng Laut selama beberapa tahun terakhir. Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, kesepakatan ini akan ditandatangani setelah poin kesepakatan ini ditambahkan.

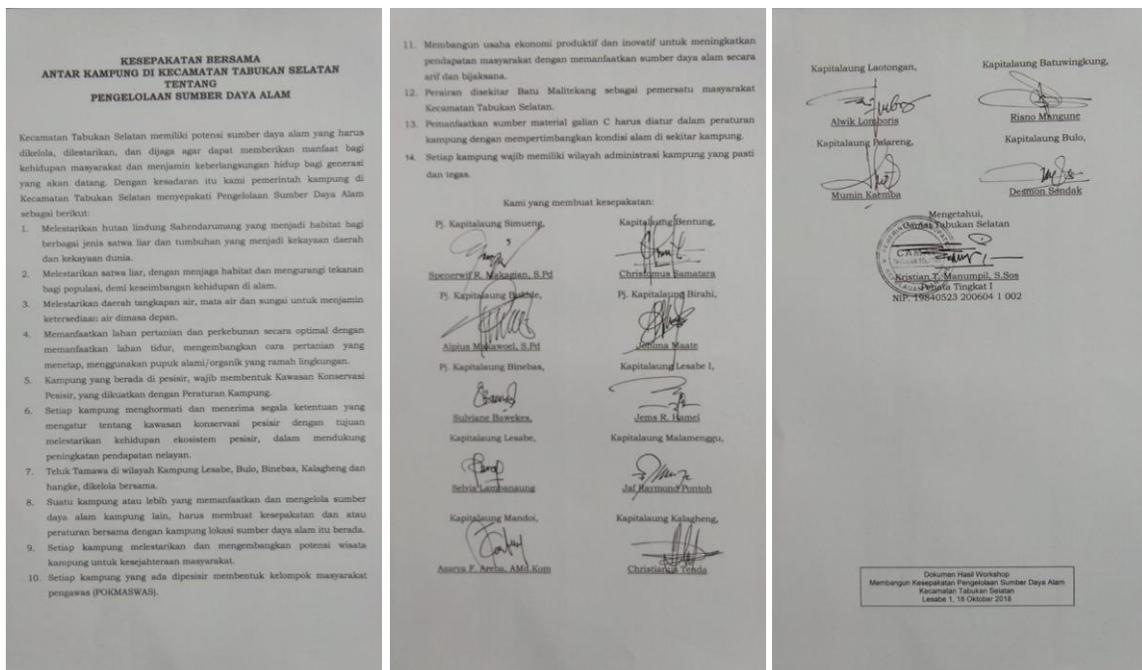


Figure 12 Kesepakatan Bersama Antar Kampung di Kecamatan Tabukan Selatan mengenai pengelolaan sumber daya alam

Konsep

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTAR KAMPUNG DI KECAMATAN NUSA TABUKAN
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

Setelah mempelajari hasil workshop membangun kesepakatan pengelolaan sumberdaya alam di Kecamatan Tabukan Selatan yang dilaksanakan tanggal 12 November 2017, mendengarkan penjelasan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam, dan setelah melakukan diskusi dan musyawarah antar kampung tanggal 29 Oktober 2018, maka dengan ini kami selaku pemerintah kampung di Kecamatan Tabukan Selatan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Wilayah perairan yang berada disekitar Pulau Inise dan seterusnya masuk wilayah administrasi Kampung Bukide Timur dan dikelola bersama oleh semua masyarakat yang ada di Kecamatan Nusa Tabukan
2. Nape Rakele masuk wilayah administrasi Kampung Nandedale dan dikelola bersama oleh semua masyarakat yang ada di Kecamatan Nusa Tabukan
3. Perairan disekitar Tanjung Seshang, Tanjung Nipa Gekhawa, Tanjung Kematang, Tanjung Talahamu dan Tanjung Nipa Kio' masuk dalam wilayah administrasi Kampung Nusa. Wilayah tersebut menjadi tempat penangkapan ikan mahalnya oleh semua nelayan.
4. Penggunaan kompresor hanya untuk penangkapan ikan dengan menggunakan jala (jala ikan malalugi)
5. Tidak diperbolehkan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
6. Membangun koordinasi antar kapitaung terkait pelanggaran Perkam tentang KKP

Konsep

7. Saling menghormati perkam dari tiap Kampung
8. Dilarang menangkap satwa liar seperti burung Puntiang, penyu, kus-kus, malao dan dugong
9. Tidak diperbolehkan mengambil terumbu karang untuk keperluan apapun
10. Pengambilan pasir dan semua material di pantai dilarang
11. Nelayan dari luar Kecamatan Nusa Tabukan melapor ke Kampung Bukide Timur untuk penangkapan ikan disekitar perairan Pulau Buang dan harus membayar retribusi sebesar 10% ke Kampung Bukide Timur. Retribusi 10% digunakan untuk pemeliharaan Pulau Buang
12. Jika ada wisatawan yang datang, maka melapor ke Kampung yang ditaja
13. Semua masyarakat wajib menjaga sumber air
14. Pelestarian pohon untuk mencegah abrasi pantai
15. Tidak membuang sampah di pantai dan di laut.

Kami yang membuat kesepakatan:

Kapitaung Nusa	FJ. Kapitaung Nanusa
Muhamad Dh. Karim Kapitaung Bukide	Djum A. Mandong Kapitaung Nandedale
Hotny Lalo	Husen Mahengeng

Konsep

Kapitaung Bukide Timur

Ali Kabanaran

Mengetahui,
Camat Nusa Tabukan

Marwan Nikulu
NIP.....

Figure 13 Draft Kesepakatan Bersama Antar Kampung di Kecamatan Nusa Tabukan mengenai pengelolaan sumber daya alam

Konsep

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTAR KAMPUNG DI KECAMATAN
TABUKAN SELATAN TENGAH
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

Setelah mendengarkan penjelasan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam, dan setelah melakukan diskusi dan musyawarah antar kampung tanggal 29 Oktober 2018, maka dengan ini kami selaku pemerintah kampung di Kecamatan Tabukan Selatan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pantai dilestarikan dan dilindungi secara bertanggung jawab.
2. Rawa dapat dikelola untuk budidaya kepiting, tumbak dan pemanfaatan tanaman Nipa.
3. Mangrove dilestarikan untuk dimanfaatkan menjadi tempat wisata alam.
4. Wilayah Lawesang (Hangke, Bowone, Salurang) dikelola bersama.
5. Terumbu Karang dilestarikan untuk kehidupan biota laut.
6. Sungai dilestarikan dengan menanam tanaman pelindung.
7. Tidak melakukan penangkapan biota laut menggunakan alat atau bahan yang tidak ramah lingkungan.
8. Laban Pertanian dikelola secara ramah lingkungan.
9. Tidak menebang pohon sembarangan di hutan.
10. Mata Air dilindungi dan dilestarikan.
11. Tidak boleh melakukan perburuan satwa yang dilindungi.

Konsep

12. Dugong dilestarikan.
13. Lamun dilestarikan untuk menjadi makanan Dugong.
14. Kampung pesisir membangun Kawasan Konservasi Pesisir.
15. Penataan Ruang Kampung di Wilayah Kecamatan Tabukan Selatan Tengah.
16. Membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Kami yang membuat kesepakatan:

Kapitaung Salurang	Kapitaung Dowone
.....
Kapitaung Hangke	Kapitaung Aha Patung
.....
Kapitaung Tambang	Kapitaung Lubupu
.....

Konsep

Kapitaung Beeng

Kapitaung Beeng Laut

.....

.....

Mengetahui,
Camat Tabukan Selatan Tengah

.....
NIP.....

Figure 14 Draft Kesepakatan Bersama Antar Kampung di Kecamatan Tabukan Selatan Tengah mengenai pengelolaan sumber daya alam

Kegiatan penyadartahuan lain yang dilakukan adalah cetak dan distribusi kaos dan poster. PEsan yang disampaikan adalah mengenai kecintaan terhadap laut dan dugong. Kaos didistribusikan khususnya kepada perangkat kampung dan anggota kelompok pengelola KKP. Sedangkan poster ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal penanganan dugong terdampar.



Figure 15 Desain kaos

Wah, Ada Dugong Terdampar!
Apa yang Harus Kita Lakukan?

Bila Masih Hidup: *1. Dugong Terdampar yang Masih Hidup Masuk dalam Kode 1*

Bila Sudah Mati: *1. Identifikasi Kondisi Bangkai Dugong Berdasarkan Kode Berikut ini:*

Kode 1
 Terdampar Hidup

Kode 2
 Terdampar Baru Mati

Kode 3
 Terdampar Mulai Membusuk

Kode 4
 Pembusukan Tingkat Lanjut

Kode 5
 Tinggal Kerangka

2. Lakukan Proses Pendataan dan Dokumentasi pada Bangkai

Foto Bangkainya
 Potret bangkai dugong dari berbagai Sisi (atas, bawah, samping kiri, dan kanan).

Lakukan Pencatatan
 Pencatatan seperti apakah ada luka akibat terperangkap jaring dan sebagainya.

3. Bila Tidak Ada Alat-alat Tersebut Di Atas, Segera Kabari Pihak Berwenang

Saatnya Menelpon Pihak Berwenang
 Hubungi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan BPSPPL SatKer Manado.

Saatnya Menelpon Pihak Berwenang
 Hubungi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan BPSPPL SatKer Manado.

*BPSPPL SatKer Manado : 085255074920 (Yasher)

Figure 16 Desain poster dugong

Indikator 3: Masyarakat mampu melakukan monitoring KKP secara mandiri, kelompok pengelola terintegrasi ke dalam Pokmaswas, dan pengawasan dugong masuk ke dalam tupoksi Pokmaswas

Sejak tahun 2017, terhitung sudah ada 6 KKP berbasis masyarakat yang terbentuk di Sangihe. Keenam KKP tersebut adalah Batuwingkung, Bukide, Bukide Timur, Nusa, Nanusa, dan Nandedakele. Empat diantaranya merupakan capaian dari proyek CEPF 2015-2017 (Batuwingkung, Bukide, Bukide Timur, dan Nusa), dan 2 sisanya adalah capaian dari proyek CEPF 2018-2019 (Nanusa dan Nandedakele). Masyarakat dari kampung yang menginisiasi KKP di tahun 2017, yaitu di Batuwingkung, Bukide, Bukide Timur, dan Nusa, telah melaksanakan pengawasan dan monitoring KKP secara mandiri. Sebagian dari kegiatan pengawasan ini didanai oleh dana desa. Dua dari keempat kampung ini, yaitu Bukide Timur dan Batuwingkung, bahkan telah berhasil menangkap pelanggar yang melanggar Peraturan Kampung (Perkam) yang mengatur KKP di Bukide Timur dan Batuwingkung. Pelanggaran-pelanggaran ini didokumentasikan oleh perangkat kampung dan kelompok pengelola, dan pelanggar diberi sanksi sesuai Perkam yang berlaku. Sanksinya berupa menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi pelanggaran yang dilakukan.

Berikut ini adalah contoh beberapa dokumentasi dari pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pelanggar di Kampung Batuwingkung.

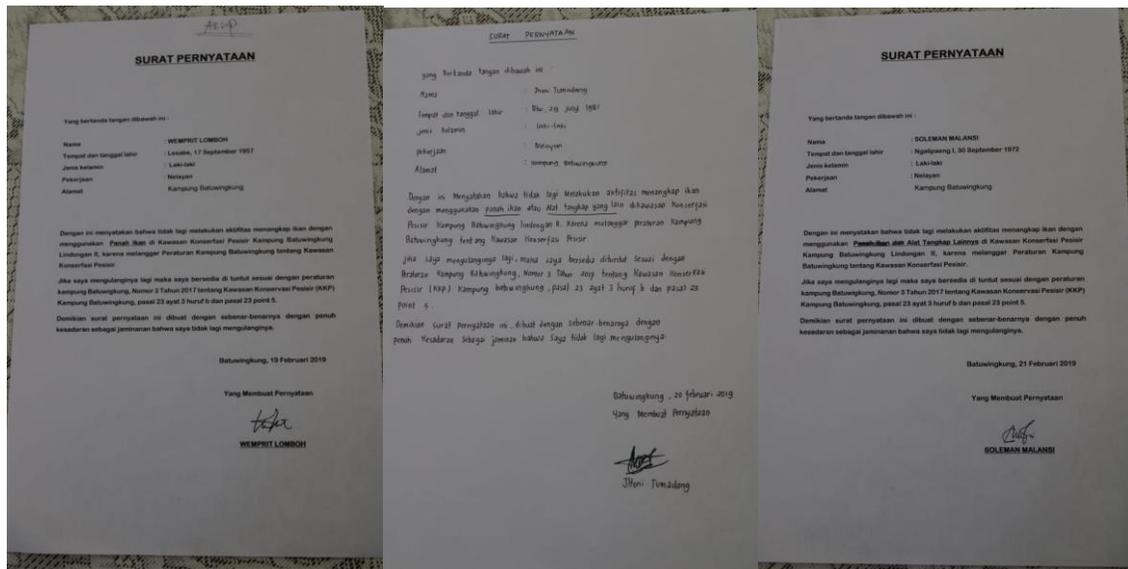


Figure 17 Dokumentasi beberapa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelanggar di Kampung Batuwingkung



Figure 18 Kapitalaung Bukide Timur menunjukkan jaring hasil sitaan pelanggaran di KKP Bukide Timur. Pelanggaran terjadi bulan Februari 2019

Bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam monitoring KKP yang mereka bangun adalah monitoring hasil tangkapan ikan dalam bentuk buku nelayan. Buku nelayan ini disosialisasikan di Kampung Nandedakele, Nanusa, Nusa, Bukide, Bukide Timur, Batuwingkung, Laotongan dan Bulo. Namun demikian, masih banyak kendala dalam monitoring menggunakan buku nelayan ini. Dari 8 kampung yang telah disosialisasi dan dilatih untuk mengisi buku nelayan, hanya Batuwingkung yang mengisi walaupun tidak rutin setiap hari. Kendala yang dihadapi adalah nelayan yang lupa mengisi setelah kembali dari laut. Rekomendasi lanjutan dari kami untuk monitoring tangkapan ikan ini adalah membagi tugas dengan kaum ibu/perempuan. Ketika bapak-bapak kembali dari laut, ibu-ibu yang akan mencatat hasil tangkapan mereka.

BUKU NELAYAN								
NAMA NELAYAN		: ALECSANDER TUMADANG						
KAMPUNG		: BATUWINGKUNG						
LINDONGAN		: I						
CLUSTER		: TABUKAN SELATAN						
					244	62	1.350.000	80.000
NO	TANGGAL	LOKASI TANGKAP	ALAT TANGKAP	JENIS IKAN	JUMLAH IKAN	DI KONSUMSI	HASIL PENJUALAN	ONGKOS MELAUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	19/02/19	ZK batuwingkung	soma	marimbolong	15	15	250.000	20.000
				bete	20			
				tumbako	10			
2.	22/02/19	ZK Kumbangehe	panah ikan	elong	9	7	200.000	10.000
				bete	7			
				sembele	15			
3.	01/03/19	ZK kumbangehe	soma	bete	20	10	350.000	20.000
				marimbolong	15			
				elong	12			
4.	07/03/19	ZK batuwingkung	panah ikan	bete	25	9	200.000	10.000
				tumbako	20			
5.	12/03/19	ZK batuwingkung	soma	laung	12	6	150.000	10.000
				bete	8			
				elong	4			
				sembele	9			
6.	22/03/19	ZK batuwingkung	soma	tumbako	13	15	200.000	10.000
				bete	8			
				marimbolong	22			

Figure 19 Hasil pengisian buku nelayan milik salah satu warga Kampung Batuwingkung

Indikator 4: KKP di Sangihe masuk dan terintegrasi ke dalam RZWP3K dan atau turunannya
Keenam KKP-BM di Sangihe sudah diusulkan untuk menjadi pencadangan kawasan konservasi dalam RZWP3K. Rangkaian ini dimulai sejak kuartal I sampai berakhirnya proyek. Rangkaian pertemuan konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi dilakukan baik secara formal (pertemuan terjadwal, menghadiri undangan) dan informal (melalui telepon dan pesan singkat). Komunikasi dengan pemerintah di tingkat pusat, yaitu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dilakukan melalui Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Adapun area yang sedang dalam proses pengusulan pencadangan ini adalah wilayah Kecamatan Nusa Tabukan, Tabukan Selatan, dan Tabukan Selatan Tengah dengan luas indikatif 66,386.62 ha.



Figure 20 Peta pengusulan pencadangan kawasan konservasi di Sangihe

B. Output

Output atau capaian yang diharapkan dalam proyek ini antara lain terbentuknya KKP berbasis masyarakat beserta kelembagaannya di Nanusa dan Nandedakele yang terintegrasi ke dalam kebijakan

pemerintah kampung, masyarakat sadar akan pentingnya dugong dan satwa laut penting lainnya dan merubah perilaku yang mengancam kelestariannya, kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan monitoring KKP meningkat, dan kelompok pengelola terintegrasi ke dalam Pokmaswas serta pengawasan dugong terintegrasi dalam tupoksi Pokmaswas melalui monitoring buku nelayan dan zona KKP berbasis masyarakat di Sangihe masuk/terintegrasi ke dalam RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara dan atau turunannya.

Capaian-capaian ini disusun untuk mencapai tujuan proyek, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Indikator-indikator dari masing-masing capaian ini akan dijelaskan seperti di bawah ini.

Output 1: Terbentuknya KKP berbasis masyarakat beserta kelembagaannya di Nanusa dan Nandedakele yang terintegrasi ke dalam kebijakan pemerintah kampung

Kegiatan yang direncanakan pada output ini antara lain konsultasi penentuan zonasi KKP dan pembentukan kelompok pengelola KKP di Nanusa dan Nandedakele dan penyusunan kesepakatan dan draft Peraturan Kampung mengenai KKP di Nanusa dan Nandedakele. Indikator dari kedua kegiatan ini adalah peta KKP Nanusa dan Nandedakele dan zonasinya disetujui oleh masyarakat Nanusa dan Nandedakele, terbentuk kelompok pengelola KKP di Nanusa dan Nandedakele yang disahkan oleh SK Kapitalaung, dan tersusun draft peraturan kampung mengenai KKP di Nanusa dan Nandedakele.



Figure 21 Draft Peraturan Kampung mengenai KKP di Nanusa (kiri) dan Nandedakele (kanan)

Kegiatan konsultasi penentuan zonasi KKP dan pembentukan kelompok pengelola KKP di Nanusa dan Nandedakele dilakukan pada bulan Oktober 2018. Tanggal 11 Oktober 2018 di Nanusa, dan tanggal 15 Oktober 2018 di Nandedakele. Dari pertemuan ini, zonasi dalam KKP Nanusa dan Nandedakele disepakati

oleh Kapitalaung, perangkat kampung, dan wakil masyarakat. Sedangkan pembentukan kelompok pengelola KKP di Nanusa dilakukan tanggal 11 Oktober 2018 dan di Nandedakele tanggal 15 Oktober 2018. Kesepakatan dan penyusunan draft peraturan kampung dilakukan tanggal 11 Oktober 2018 di Nanusa dan 18 Oktober 2018 di Nandedakele. Dalam pertemuan ini juga disusun rencana kerja jangka menengah kelompok pengelola KKP Nanusa (2018-2020).

Luas area kelola masyarakat yang disepakati di kedua kampung ini adalah seluas 150.04 ha. Kampung Nanusa telah menyepakati pembentukan KKP-BM seluas 60.95 ha, yang terdiri dari 5 ha untuk zona inti dan 55.93 untuk zona pemanfaatan. Sedangkan Kampung Nandedakele menyepakati untuk membentuk KKP-BM seluas 89.09, yang terdiri dari zona inti 8.03 ha, zona perikanan terbatas 19.19 ha, dan zona perikanan berkelanjutan 61.87 ha.

Output 2: Masyarakat sadar akan pentingnya dugong dan satwa laut penting lainnya dan merubah perilaku yang mengancam kelestariannya

Kegiatan yang direncanakan dalam output ini antara lain sosialisasi pada masyarakat sekitar KKP dan kampung lain di pesisir, cetak dan distribusi poster infografis, cetak dan distribusi kaos, dan sosialisasi dan sharing data “buku nelayan”. Indikator-indikator dari keempat kegiatan ini adalah setidaknya 20 anggota masyarakat di masing-masing kampung sasaran sosialisasi mengikuti kegiatan sosialisasi, setidaknya 50 poster tersebar di masing-masing kampung-kampung sasaran sosialisasi, setidaknya 10 kaos tersebar di kampung yang memiliki KKP, dan setidaknya 10 nelayan mengikuti sosialisasi dan sharing data “buku nelayan” di masing-masing kampung sasaran.

Kegiatan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan workshop kesepakatan bersama antar kampung untuk pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan sosialisasi di Kecamatan Tabukan Selatan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018, Kecamatan Nusa Tabukan pada tanggal 21 Oktober 2018, dan Kecamatan Tabukan Selatan Tengah pada tanggal 22 Oktober 2018. Sedangkan sosialisasi di Kampung Laotongan dilakukan pada tanggal 14 November 2018, Kampung Palareng tanggal 16 November 2018, Kampung Beeng Darat tanggal 19 November 2018, dan Kampung Bulu tanggal 5 Desember 2018. Materi sosialisasi meliputi pentingnya KKP dan konservasi daerah pesisir.



Figure 22 Serah terima poster dugong kepada Kapitalaung Batuwringkung



Figure 23 Serah terima poster dugong kepada perangkat Kampung Nusa



Figure 24 Poster dugong yang terpasang di Kampung Barangka



Figure 25 Poster dugong yang terpasang di Kampung Batuwingkung

Distribusi kaos dilakukan utamanya di kampung-kampung yang memiliki KKP, yaitu Batuwingkung, Bukide, Bukide Timur, Nusa, Nanusa, dan Nandedakele. Sedangkan distribusi poster dugong dilakukan di Batuwingkung, Bulu, Laotongan, Beeng Laut, Bukide, Bukide Timur, Nusa, Nanusa, dan Nandedakele.

Pertemuan sharing hasil buku nelayan hanya dilakukan di Kampung Batuwingkung, karena dari pelaksanaannya, hanya kampung ini yang cukup rutin mengisi buku nelayan. Kendala pengisian buku nelayan ini terjadi karena kebanyakan nelayan masih belum terbiasa untuk mengisi setiap hari mereka pulang dari laut. Selain itu, pemerintah kampung juga masih belum serius untuk menindaklanjuti kegiatan ini, walaupun mereka mengakui data hasil buku nelayan ini akansangat berguna bagi mereka melengkapi profil kampung.

Output 3: Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan dan monitoring KKP meningkat, dan kelompok pengelola terintegrasi ke dalam Pokmaswas serta pengawasan dugong terintegrasi dalam tupoksi Pokmaswas melalui monitoring buku nelayan

Untuk mencapai output ini, kegiatan yang direncanakan antara lain penyusunan rencana pengelolaan KKP di kampung Batuwingkung, Nusa, Bukide, Bukide Timur, Nanusa, dan Nandedakele yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa, lokakarya dengan pihak terkait di kabupaten untuk pengawasan dan pengamanan KKP, pendampingan pencatatan buku nelayan dan pengawasan KKP, dan analisis data hasil pencatatan buku nelayan.

Penyusunan rencana pengelolaan KKP di Nanusa dan Nandedakele dilakukan bersamaan dengan proses pembentukan kelompok pengelola KKP di kedua kampung ini. Poin-poin utama dari rencana pengelolaan di Nanusa dan Nandedakele antara lain pengawasan, dan pengadaan tali, jangkar, dan pelampung tanda batas. Sedangkan untuk Batuwingkung, Bukide, dan Bukide Timur, penyusunan rencana pengelolaan KKP ini merupakan penyusunan rencana pengelolaan lanjutan dari rencana pengelolaan yang sudah ada sebelumnya.

Penyusunan rencana pengelolaan KKP di Bukide Timur dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2019, Batuwingkung tanggal 22 Agustus 2018, dan Bukide tanggal 12 September 2018. Poin-poin penting dari rencana pengelolaan di Bukide Timur adalah peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam monitoring ekologi, peningkatan kapasitas anggota dalam ekowisata berbasis masyarakat, pengadaan peralatan untuk patroli dan monitoring, kegiatan bersih KKP, pendokumentasian pelanggaran, dan publikasi KKP dalam media sosial.



Figure 26 Penyusunan rencana pengelolaan KKP Bukide Timur

Di Kampung Bukide, poin-poin utama dari rencana pengelolaan KKP mereka antara lain peremajaan tanda batas KKP yang rusak/hanyut terbawa arus, pengadaan peralatan untuk pengawasan dan monitoring, bersih pantai, transplantasi karang, peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam monitoring ekologi, pencatatan hasil tangkapan nelayan dalam buku nelayan, dan rencana memindahkan zona inti ke lokasi yang arusnya tidak begitu kencang.



Figure 27 Penyusunan rencana pengelolaan KKP Bukide

Sedangkan di Kampung Batuwingkung, poin-poin utama rencana pengelolaan mereka adalah sebagai berikut: sosialisasi larangan penggunaan kompresor, kegiatan bersih KKP, kegiatan patroli dan pengawasan, pengadaan peralatan untuk pengawasan dan monitoring, pembangunan sekretariat kelompok, penambahan tanda batas KKP, perencanaan pembuatan zona rehabilitasi karang, peningkatan kapasitas anggota kelompok dalam pengelolaan, dan monitoring ekologi, monitoring tangkapan ikan dengan buku nelayan, dan koordinasi dengan POLAIRUD dan LANAL untuk pengamanan KKP.



Figure 28 Penyusunan rencana pengelolaan KKP Batuwingkung

Lokakarya dengan pihak terkait di tingkat kabupaten untuk pengawasan dan pengamanan KKP dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2019 di ruang pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sangihe. Turut mengundang juga perwakilan dari Pangkalan TNL AL (LANAL) Sangihe, POLAIRUD, dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna. Dalam lokakarya ini disepakati bahwa pemerintah kampung dan kelompok pengelola KKP dapat melaporkan pelanggaran yang termasuk ke dalam pelanggaran berat ke instansi-instansi pemerintah yang terkait. Selain itu, sinergi juga diharapkan terjadi antara LANAL/POLAIRUD dan pemerintah kampung, karena kedua instansi ini memiliki program sosialisasi mengenai perlindungan dan keamanan laut.

Dari pihak Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga menyanggupi untuk mendukung pemerintah kampung dan kelompok pengelola jika terbukti ada pelanggaran yang melanggar undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, dengan adanya lokakarya ini diharapkan adanya kerjasama yang baik di masa depan antara instansi pemerintah kabupaten dengan pemerintah kampung dan kelompok pengelola dalam penjagaan dan pengamanan wilayah laut.



Figure 29 Koordinasi dengan Pangkalan TNI AL di Tahuna



Figure 30 Koordinasi dengan POLAIRUD di Tahuna



Figure 31 Kegiatan Lokakarya Membangun Mekanisme Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Pesisir Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe

BERITA ACARA
LOKAKARYA
MEMBANGUN MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGAMANAN
KAWASAN KONSERVASI PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembelan Belas (23-5-2019) bertempat di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dilaksanakan Rapat diawali dengan pengantar kegiatan oleh Direktur Perikanan Sangihe oleh Saswandi Bahamsa, arahan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selanjutnya presentasi oleh Ibu Anni Ratri Putriyasa dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta rapat sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pembahasan usulan disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemetaan berbagai pelanggaran yang sering terjadi di Wilayah Konservasi Kawasan Pesisir dan di Laut Lepas (jenis pelanggaran terlampir).
2. Pemetaan Mekanisme Penanganan Pelanggaran baik oleh masyarakat kampung, pemerintah kampung dan Kelompok Konservasi Pesisir serta Pihak Berwenang (Lanal, Polairud, Polres dan Pengawas Perairan) dengan jenis pelanggaran dan penanganan terlampir.
3. Dalam penanganan Pelanggaran untuk setiap stakeholder hendaknya memperhatikan regulasi yang berlaku.
4. Untuk setiap perbuatan yang melanggar pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir yang tertuang dalam Peraturan Kampung, jika sudah dilakukan berkali-kali dengan bukti yang ada sehingga menimbulkan ketidaknyaman dan keresahan di Kampung, maka pemerintah kampung dapat melaporkan ke pihak berwenang (polsek setempat).
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat mendukung kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Pesisir berbasis Masyarakat dan hendaknya kegiatan pengawasan dan pengamanan ini harus didukung oleh semua stakeholder.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA RAPAT

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1.	Ernst H Utms, S.Pi	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepl. Sangihe	
2.	Oni Hariyanto (Lettu Laut)	Lanal Tuhuna	
3.	Ipsa E. Dolongpota	SatPolairud Polres Kepulauan Sangihe	
4.	Eko H. Toekidjo, ST., M.Eng.	Doppelhang Kab. Kepl. Sangihe	
5.	Steveny Takapaha, S.Pi	Kepala Sub Seksi Operasional Pengawasan dan Pertanganan Pelanggaran, Stasiun PSDKP Tuhuna	
6.	Devry H Rompis, S.Pi	Kabid Pengelolaan Ruang Laut DKP Sangihe	
7.	Dylan Palandeng, S.Pi MAP	Kabid Budidaya DKP Sangihe	
8.	Idrus Mantali	Kabid Perijinan, Pengawasan Usaha dan Kelembagaan DKP Sangihe	
9.	Ellen M Hamel, S.Pi	Kasi Perencanaan Ruang Laut, Konservasi dan Pengendalian SEKIP	
10.	Oglio T. Sataa, S.Pi	Kasi Pondsayamanan Pesisir, Pulau Pulau Kecil dan Wisata Bahari DKP Sangihe	
11.	L. M. Makasangkil, S.Pi	Kasi Budidaya DKP Sangihe	
12.	M. Jacobus, S.Pi	Kasi PZBP DKP Sangihe	
13.	Victor Mangune	Ketua MFK Batuwingkung	
14.	Charles Mangune	Ketua Kelompok Cinta Laut Batuwingkung	
15.	Ali Kabenaran	Kapitalang Bukide Timur	
16.	Arsad Bulegalangi	Bendahara KKP Kaderotang Bukide Timur	
17.	Muamar M. Kalase	Anggota KKP Kaderotang Bukide Timur	

Figure 32 Berita acara kesepakatan mekanisme pengawasan dan pengamanan KKP-BM di Sangihe

Kegiatan pelatihan dan pengenalan buku nelayan dilakukan di Kampung Bukide, Bukide Timur, Nusa, Nanusa, Nandedakele, Batuwingkung, Bulu, Laotongan, Palareng, dan Beeng Darat, di kuartal ke II dan III. Dalam kegiatan ini telah disepakati bahwa akan ada 10 nelayan dari masing-masing kampung yang akan diujicobakan untuk melakukan pencatatan setiap kali mereka pulang melaut. Pencatatan hasil melaut ini dimaksudkan untuk mengukur dampak KKP-BM secara ekonomi. Parameter yang diukur adalah tanggal, lokasi tangkap, alat tangkap, jenis ikan, jumlah ikan hasil tangkapan, jumlah ikan yang dikonsumsi, hasil penjualan hasil tangkapan, dan modal yang dikeluarkan.

FORMAT BUKU NELAYAN

TANGGAL	LOKASI TANGKAP	ALAT TANGKAP	JENIS IKAN	JUMPAH IKAN	DIKONSUMSI	HASIL PENJUALAN	ONGKOS MELAUT
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Feb' 2019	BEENG LAUT	HAND LINE	PANTANG/CRABING	50 ekor	10	Rp 400.000,-	Rp 200.000,-
7 Feb' 2019	ZK MAHSALANGENS	SOMA	- MARIBOLONG - BETE - TEMBAKO	50 15 20	20	Rp 400.000,-	Rp 10.000,-
8 Feb' 2019	NENUNG	LONG LINE	HIU	7	1	Rp 6.000.000,-	Rp 800.000,-
9 Feb' 2019	ZK BATUWINGKUNG	PANAH IKAN	- ELANG - SEMBELE - SAWATEHG	20 20 10	10	Rp 300.000,-	Rp 50.000,-
10 Feb' 2019	ZK KUMATGEHE	PKAT TANAM	- MABALUGIS - DEHS - TUDE	3000 5000 200	150	Rp 16.000.000,-	Rp 100.000,-

Figure 33 Contoh format pencatatan buku nelayan

Dalam pencatatannya, nelayan didampingi untuk mencatat buku nelayan. Pendampingan pertama dilakukan segera setelah pelatihan selesai. Pendampingan selanjutnya dilakukan setiap kali tim lapangan mengunjungi kampung-kampung tersebut. Kendala yang dihadapi cukup besar, karena nelayan-nelayan ini tidak terbiasa untuk mencatat. Keluhan yang banyak didengar adalah setiap kali pulang melaut mereka sudah terlalu lelah sehingga lupa mencatat. Selain itu, walaupun pemerintah kampung mengakui bahwa pencatatan ini akan sangat membantu mereka dalam melengkapi profil desa, tampaknya mereka belum serius dalam mendukung kegiatan buku nelayan ini.

Dari 10 kampung yang diberi pelatihan buku nelayan, hanya 1 kampung yang tampak cukup termotivasi dalam kegiatan ini. Kampung tersebut adalah Batuwingkung. Walaupun demikian, masih ada beberapa orang nelayan yang belum mengisi.

Output 4: Zona KKP berbasis masyarakat di Sangihe masuk/terintegrasi ke dalam RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara dan atau turunannya

Kegiatan yang direncanakan dalam output ini adalah rangkaian konsultasi dengan DKP tingkat kabupaten, rangkaian konsultasi dengan DKP dan Bappeda tingkat provinsi, dan rangkaian FGD di tingkat provinsi untuk mengintegrasikan KKP berbasis masyarakat di Sangihe ke dalam RZWP3K dan atau turunannya.

Konsultasi dengan DKP tingkat kabupaten sudah dilakukan sejak sebelum proyek ini dimulai. Setelah proyek CEPF pertama di Sangihe selesai di akhir tahun 2017, kami sudah mulai berdiskusi dengan DKP Kabupaten Sangihe untuk menyusun rencana pengintegrasian KKP berbasis masyarakat di Sangihe ke dalam dokumen perencanaan wilayah di tingkat provinsi. Selain untuk memberikan pengakuan atas inisiatif-inisiatif masyarakat di tingkat tapak dalam hal konservasi pesisir dan laut, hal ini juga dimaksudkan agar inisiatif-inisiatif yang sudah terbangun dengan baik dengan semangat masyarakat tapak tidak berbenturan dengan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini wewenangnya dipegang oleh pemerintah di tingkat provinsi (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Secara informal, konsultasi dengan DKP tingkat kabupaten selalu kami lakukan baik melalui tatap muka, maupun telepon. Secara formal, konsultasi dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2018 di ruang pertemuan DKP Kabupaten Sangihe. Hasil konsultasi ini adalah kesepakatan bahwa DKP Kabupaten Kepulauan Sangihe akan mendukung usaha pengusulan KKP berbasis masyarakat Sangihe sebagai pencadangan kawasan konservasi.



Figure 34 Konsultasi dengan DKP Kabupaten Kepulauan Sangihe

Konsultasi dengan DKP tingkat provinsi dimulai pada tanggal 21 September 2018. YAPEKA menghadiri undangan Diskusi Publik Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RZWP3K Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh DKP Sulawesi Utara. Dalam diskusi ini dibahas rancangan peta perbaikan dari Pokja RZWP3K. Salah satu hasil dari diskusi ini adalah untuk segera mendorong inisiatif-inisiatif masyarakat tapak, seperti halnya KKP di Sangihe, untuk diusulkan ke dalam pencadangan kawasan konservasi dalam RZWP3K.



Figure 35 Diskusi publik yang diselenggarakan oleh DKP Provinsi Sulawesi Utara untuk membahas Perda No. 1 Tahun 2017

Diskusi selanjutnya dilakukan di kuartal II untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil. Pada tanggal 21 November 2018, DKP Provinsi Sulawesi Utara menyarankan kepada YAPEKA untuk membuat diskusi konsultasi yang mengundang SKPD terkait di tingkat provinsi untuk membahas masalah pengusulan pencadangan kawasan konservasi di Sangihe ini.



Figure 36 Diskusi tanggal 21 November 2018 dengan Kepala Seksi Konservasi dan Perlindungan Jenis Ikan DKP Provinsi Sulawesi Utara

Konsultasi dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga kami lakukan di kuartal ke II pada tanggal 22 November 2018. Staf Direktorat KKHL menyarankan untuk mengkonsolidasikan semua data yang ada, termasuk peta, untuk bertemu dengan para pihak di tingkat provinsi.



Figure 37 Pertemuan dengan salah satu staf Direktorat KKHL, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 November 2018

Tindak lanjut dari ketiga pertemuan ini dilaksanakan di kuarter III pada tanggal 6 Maret 2019. Konsultasi ini mengundang SKPD terkait di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, DKP Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan dari kalangan LSM dan akademisi. Dalam pertemuan ini, YAPEKA mengutarakan hasil kerja di Sangihe sejak tahun 2015 dan maksud kami untuk mengusulkan inisiatif-inisiatif masyarakat ini menjadi pencadangan kawasan konservasi. Rekomendasi dari diskusi dan konsultasi ini adalah diadakannya Diskusi Kelompok Terarah yang mengundang para pihak di tingkat tapak, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan DKP Provinsi Sulawesi Utara.



Figure 38 Konsultasi dengan para pihak di pemerintah tingkat provinsi pada tanggal 6 Maret 2019

Berdasarkan rekomendasi dari konsultasi pada tanggal 6 Maret 2019, kegiatan FGD di tingkat provinsi untuk mengintegrasikan KKP berbasis masyarakat di Sangihe ke dalam RZWP3K dan atau turunannya diadakan dalam bentuk Diskusi Kelompok Terarah pada tanggal 23 Juli 2019. Diskusi ini diselenggarakan di ruang pertemuan DKP Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan turut mengundang perwakilan dari Seksi Konservasi dan Perlindungan Jenis Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara dan Direktorat KKHL, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tanggal 16 Juli 2019, YAPEKA mengadakan audiensi ke Bapak Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) di kantornya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada pertemuan ini kami memaparkan hasil kerja kami dalam usaha-usaha konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di Sulawesi Utara, termasuk wilayah kerja YAPEKA dalam CEPF. Bapak Direktur KKHL menyambut baik pemaparan ini, dan mengajak YAPEKA untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung sinergitas antara YAPEKA dan KKP. Bapak Direktur KKHL juga menyampaikan dukungannya terhadap pendampingan masyarakat di tingkat tapak yang selama ini dilakukan YAPEKA dalam CEPF.



Figure 39 Pertemuan dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 16 Juli 2019

Hasil dari Diskusi Kelompok Terarah ini adalah ditandatanganinya berita acara yang menyepakati diusulkannya “Kluster Nusa Tabukan, Tabukan Selatan, dan perairan di sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara” seluas 66,386.62 ha untuk dicadangkan sebagai kawasan konservasi melalui SK Gubernur Sulawesi Utara. Namun demikian, Diskusi Kelompok Terarah ini baru menjadi langkah awal perjuangan untuk mencadangkan KKP berbasis masyarakat di Sangihe sebagai kawasan konservasi. Perlu diadakan pertemuan-pertemuan lanjutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Figure 40 Diskusi Kelompok Terarah tanggal 23 Juli 2019 di Tahuna



Figure 41 Berita acara kesepakatan Diskusi Kelompok Terarah tanggal 23 Juli 2019

Kami mengadakan pertemuan kembali dengan Direktorat KKKL pada tanggal 14 Agustus 2019 untuk melaporkan perkembangan hasil kerja kami di Sulawesi Utara, termasuk perkembangan pengusulan pencadangan kawasan konservasi seluas 66,386.62 ha. Dalam kesempatan ini juga kami mengundang Dr. Donna Kwan dari CMS Dugong MOU (UNEP) untuk membicarakan proyek konservasi lamun dan dugong yang baru setelah CEPF berakhir. Proyek berskala regional Asia Tenggara ini rencananya akan diimplementasi pada kuartal IV tahun 2019 sampai tahun 2022. Hal ini merupakan salah satu dari dampak program CEPF di Sangihe, Sulawesi Utara.



Figure 42 Pertemuan dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 14 Agustus 2019

IV. Perubahan

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas (tidak perlu diisi apabila program TIDAK menysasar pada Arahlan Strategis 1)

Table 2 Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
-	-	-	-

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Table 3 Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
KBA Perairan Sangihe	Pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dlm bentuk KKP di Nanusa dan Nandedaleke	150.04 ha	Berita acara kesepakatan, peta KKP hasil kesepakatan
KBA Perairan Sangihe	Pengusulan pencadangan kawasan konservasi di Sangihe	66,386.62 ha	Berita acara kesepakatan, peta usulan pencadangan

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

Table 4 Perlindungan kawasan

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
-	-	-	-

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (*silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan*)

Table 5 Karakteristik penerima manfaat

Nama Komunitas	Jenis Komunitas							Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
	A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	4
	Kampung Nanusa	X		X						X	
Kampung Nandedakele	X		X							X	
Kampung Nusa	X		X								X
Kampung Bukide	X		X						X		
Kampung Bukide Timur	X		X						X		
Kampung Batuwingkung	X		X						X		
Kampung Laotongan	X		X						X		
Kampung Bulu	X		X					X			
Kampung Palareng	X		X						X		
Kampung Beeng Darat	X		X						X		
Kampung Beeng Laut	X		X					X			

Keterangan:

A. Ekonomi subsisten

B. Small landowners

C. Masyarakat hukum adat/komunitas lokal

D. Pastoralists/nomadic people

E. Recent migrants

F. Komunitas perkotaan

G. Lainnya

1. 50-250 jiwa

2. 251-500 jiwa

3. 501-1000 jiwa

4. Di atas 1000 jiwa

b. Jumlah penerima manfaat

Table 6 Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan	2845*	2546*
Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik)		
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim	2845*	2845*
Kepemilikan lahan yang jelas		

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Pengakuan atas kearifan lokal		
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan		
Peningkatan akses atas jasa lingkungan		
Pelatihan (sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat)		
Lain-lain		
Total Penerima Manfaat	2845*	2845*

*Asumsi jumlah penerima manfaat adalah jumlah penduduk yang ada di kampung-kampung sasaran kegiatan.

5. Regulasi/kebijakan lokal

Table 7 Regulasi/kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan
Draft peraturan kampung mengenai KKP-BM di Nanusa	Kampung	Pengelolaan sumber daya alam	Draft yang disusun dapat disahkan menjadi Peraturan Kampung dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir berbasis masyarakat di Kampung Nanusa
Draft peraturan kampung mengenai KKP-BM di Nandedakele	Kampung	Pengelolaan sumber daya alam	Draft yang disusun dapat disahkan menjadi Peraturan Kampung dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir berbasis masyarakat di Kampung Nandedakele
Kesepakatan antar kampung mengenai pengelolaan sumber daya alam di Tabukan Selatan	Kecamatan	Pengelolaan sumber daya alam	Kampung-kampung di wilayah Kecamatan Tabukan Selatan sepakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemantauan secara bersama-sama.
Draft kesepakatan antar kampung mengenai pengelolaan sumber daya alam di Nusa Tabukan	Kecamatan	Pengelolaan sumber daya alam	Kampung-kampung di wilayah Kecamatan Nusa Tabukan sepakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemantauan secara bersama-sama.
Draft kesepakatan antar kampung mengenai pengelolaan sumber daya alam di Tabukan Selatan Tengah	Kecamatan	Pengelolaan sumber daya alam	Kampung-kampung di wilayah Kecamatan Tabukan Selatan Tengah sepakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemantauan secara bersama-sama.

6. Jaringan kerja/forum multipihak

Table 8 Jaringan kerja/forum multipihak

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan
Kesepakatan pengawasan dan pengamanan KKP-BM di Sangihe	Kabupaten	Adanya kerjasama dan dukungan dari para pihak dalam menjaga keamanan laut dari pelanggaran-pelanggaran peraturan kampung maupun peraturan perundang-undangan.	2019
Kesepakatan bersama masyarakat untuk pengusulan pencadangan kawasan konservasi pesisir di Sangihe ke dalam RZWP3K	Provinsi	Sebagai salah satu dasar untuk pengusulan pencadangan kawasan konservasi Sangihe di dalam dokumen perencanaan wilayah laut dan pesisir di tingkat provinsi.	2019

7. Bentang alam produktif

Table 9 Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
-	-	-	-

V. Pembelajaran

Beberapa pembelajaran yang kami ambil dalam durasi proyek kali ini adalah sebagai berikut:

Table 10 Pembelajaran yang diambil

Isu	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
1. Tidak adanya jembatan untuk mempertemukan kesulitan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dengan kebijakan atas pengakuan wilayah kelola masyarakat sudah diatur dalam regulasi, namun prosesnya agak sulit untuk diintervensi oleh program/LSM, karena itu ada di dalam ranah pemerintah.	Adanya celah dalam implementasi kebijakan dan pengakuan atas wilayah kelola masyarakat karena regulasi yang membatasi.	Pengelolaan di tingkat tapak belum diakui sebagai bagian dalam perencanaan pengelolaan pesisir dan laut di tingkat provinsi yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan pesisir dan laut.	Penyesuaian kebijakan untuk memudahkan masyarakat tapak mendapat akses/pengakuan atas pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
	Tumpang tindih kebijakan lintas sektoral. Contoh: antara KKP dan Kemendagri/Kemendes.		Perlu adanya intervensi untuk merumuskan nota kesepahaman lintas sektoral dalam pengelolaan pesisir dan laut di tingkat tapak.
2. Masyarakat tapak dan pemerintahannya telah mampu mengintegrasikan program KKP-BM ke dalam perencanaan kampung.	Program telah memberikan intervensi terhadap perubahan cara pandang tentang definisi pengelolaan kawasan pesisir. Pembangunan kawasan pesisir tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga non-fisik, seperti peningkatan kapasitas masyarakat dan penyadartahuan.	Sebanyak 294 juta dari dana desa telah dialokasikan untuk inisiasi dan pengelolaan KKP-BM di Sangihe dalam tahun anggaran 2018-2019.	Inisiatif yang telah dibangun di tingkat tapak perlu mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten dalam bentuk insentif atau penghargaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat.
3. Monitoring hasil tangkap melalui buku nelayan tidak mencapai target.	Masyarakat masih belum mengerti manfaat langsung dari pencatatan hasil tangkap.	Data pencatatan tidak mencukupi untuk analisis monitoring hasil tangkap.	Buku nelayan atau kegiatan monitoring sejenis harus menjadi agenda kampung untuk menjamin keberlanjutan.
			Pencatatan bisa dilakukan jika dilakukan

Isu	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
			orang lain, bukan yang bersangkutan. Proses pencatatan disatukan dengan fungsi-fungsi yang sejalan di tingkat pemerintah desa (misalnya di tingkat Kepala Urusan- Kaur)
4. Keberlanjutan usaha konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.	Salah satu faktor penyebabnya adalah cerita sukses dan pembelajaran dari dua proyek CEPF di Sangihe.	Munculnya dukungan dari CMS Dugong MOU - UNEP untuk melanjutkan pekerjaan konservasi pesisir dan laut di Sulawesi Utara.	Integrasi capaian perlu dilakukan dengan proyek-proyek yang akan datang, dan memastikan keberlanjutan intervensi dan asistensi.
5. Pengusulan kebijakan pengelolaan pesisir di tingkat provinsi yang tersendat.	Pergeseran mandat pemerintahan di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	Integrasi ke sistem pemerintahan desa dan sistem tradisional	Perlu dilakukan analisis kebijakan pasca proyek untuk memastikan peran masyarakat pesisir dalam pengelolaan pesisir.
6. Proses pengusulan pengelolaan pesisir di Sangihe berkontribusi pada target-target pengelolaan ruang laut dan spesies penting dilindungi (dugong).	Adanya komunikasi kebijakan yang dilakukan YAPEKA dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Dukungan dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut/Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut kepada YAPEKA untuk meneruskan proses pengusulan yang didukung dengan integrasi data yang mencukupi.	Komunikasi untuk mendorong kebijakan dapat diteruskan untuk memastikan integrasi yang lebih menyeluruh.
7. Inisiasi perlindungan kawasan 66,386.62ha bisa dilakukan.	Adanya komunikasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan, baik di tingkat tapak,	66,386.62 ha sedang didorong untuk dicadangkan menjadi kawasan	Perlu adanya tindak lanjut sampai kawasan dicadangkan melalui SK Gubernur Sulawesi Utara.

Isu	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
	kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat.	konservasi dalam RZWP3K Sulawesi Utara	

VI. Status Keuangan

- a. Pemasukan : Rp. 363.891.890
- b. Pengeluaran : Rp. 454.159.765
- c. Saldo : (Rp. 90.267.875)